

# NASIONALISME DAN REGIONALISME DI WILAYAH ACEH

Tk. Ibrahim Alfian

*Mijnheer de voorzitter! Wanneer men den inwendigen politieke toestand hier te lande bespreekt, dan kan het woord "Indonesie" niet onaangeroerd blijven. Sommige sprekers gebruiken het gaarne, andere daarentegen weer met tegenzin. Ik echter behoor tot diegenen, die het woord "Indonesie" met genoegen gebruiken. Immers, de vorming van een Indonesische natie is in de naaste toekomst geen idee fixe doch een mogelijkheid; de basis ervan bestaat reeds. In dit verband moge worden verwezen naar de taal, kunst en het gronden recht. Het is wel degelijk mogelijk en gewenst dien reeds bestaanden grondslag binnen de perken van den wet, voort te bouwen in de richting van een nationale eenheid, een der noodzakelijke voorwaarden om te komen tot staattundige vrijheid.<sup>1</sup>*

*Terjemahannya:*

*Tuan ketua! Jikalau kita membicarakan keadaan politik di dalam negeri ini, maka kata "Indonesia" tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Beberapa pembicara memakainya dengan segala senang hati, sebaliknya yang lain lagi enggan memakai kata "Indonesia" itu. Akan tetapi saya sendiri termasuk diantara orang-orang yang dengan segala senang hati memakai kata "Indonesia". Memang sesungguhnya pula, terbentuknya suatu kesatuan Nasional Indonesia dalam waktu yang dekat ini, bukanlah suatu impian yang hampa tetapi suatu kemungkinan. Dasar-dasar pembentukannya sudah ada. Dalam hubungan ini dapat ditunjukkan adanya bahasa, kesenian dan hukum tanah. Maka adalah mungkin sekali dan sangat diharapkan dasar-dasar yang telah ada itu dikembangkan dalam batas-batas hukum yang ada ke arah suatu kesatuan nasional, salah satu diantara syarat-syarat mutlak untuk mencapai kemerdekaan kenegaraan.*

---

Penulis: Guru Besar Fakultas Sastra Uni-  
versitas Gadjah Mada

---

*Handelingen Volksraad, Vergadering,  
Maandag 18 Juni 1928, hlm. 166.*

Demikianlah bagian awal pidato yang diucapkan oleh Teuku Nyak Arif, utusan Aceh dalam sidang Volksraad ke-8, hari Senin tanggal 18 Juni 1928, empat bulan lebih sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928 di Jakarta.

Dengan kutipan pidato T. Nyak Arif, yang bersama H. Husni Thamrin membentuk fraksi Nasional di Volksraad,<sup>2</sup> hendak diawali pengenalan terhadap masyarakat Aceh, yakni bahwa dalam masa pra-Kemerdekaan abad XX Nasionalisme telah merambah ke Tanah Rencong. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa Sarekat Islam (S.I.) masuk ke Aceh pada bulan Juni 1916. Mula-mula muncul di Tapaktuan, Aceh Barat, kemudian mendapat pengikut di tempat-tempat lain di Aceh.<sup>3</sup> Teuku Keujruen Chik Alibasyah, *uleebalang* (*zelfbestuurder*) Samalanga dan Teuku Abdul Hamid Orang Kaya Sri Maharaja, *ulee-*

*balang* Lhok Seumawe, bersama ratusan rakyatnya menjadi anggota S.I. Pada tahun 1919/1920, karena kegiatannya dalam S.I. tiga orang dari golongan *uleebalang*, yaitu Teuku Chik Muhammad Sa'id dari Negeri Cunda (berbatasan dengan Lhok Seumawe), Teuku Abdullatif dari Negeri Geudong (16 km ke arah Timur Lhok Seumawe), dan Teuku Ri Bujang dari Negeri Nisam (juga termasuk dalam kewedanaan Lhok Seumawe) dibuang oleh Pemerintah Belanda masing-masing ke Irian Barat, Sumatra Barat (kemudian ke Jawa), dan ke Timor.<sup>4</sup>

## II

Prof. Dr. Taufik Abdullah, pakar ilmu sosial ternama,<sup>5</sup> mengemukakan bahwa untuk mengerti dinamika dan proses pembentukan kesadaran masyarakat Aceh serta kecenderungan kulturalnya ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1) proses Islamisasi, 2) zaman keemasan Sultan Iskandar Muda di abad XVII, 3) Perang melawan Belanda 1873-1912, dan 4) Revolusi Nasional, 1945-1949.

Untuk menjelaskan keempat butir yang dengan tepat telah dikemukakan oleh Taufik Abdullah diperlukan sedikit uraian .

<sup>2</sup> Dalam sidang Volksraad tanggal 27 Januari 1930, M. Husni Thamrin mengumumkan berdirinya sebuah fraksi baru, Fraksi Nasional dengan sepuluh orang anggota, dengan ketua M. Husni Thamrin dan anggota-anggotanya, Kusumo Utoyo, Dwijosewoyo, Datuk Kayo, Muchtar, Teuku Nyak Arif, Suangkupon, Pangeran Ali, Sutadi, dan R. P. Suroso. Lihat Mardanas Sofwan, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 64-5.

<sup>3</sup> A. G. Van Sluijs, *Nota: Abjeh en Onderhoorigheden, September 1918-Oktober 1920*, Kernpapieren H. 797/156, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Leiden, Lampiran VII.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Taufik Abdullah, "Pengantar", dalam Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985, hlm. 12.

Pertama, di Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara ditemukan peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam pertama di Nusantara, antara lain makam Sultan Malikussalih, pendiri Kerajaan Samudra, yang menurut inskripsi pada nisannya mangkat pada tahun 1297. Setelah lebih dari satu abad Islam bertapak di Pasai, agama ini mendapat tempat di istana Kerajaan Melaka. Akibat pengaruh Pasai Parameswara, pendiri Kerajaan Melaka, memeluk agama Islam serta menikah dengan puteri Pasai pada tahun 1414.<sup>6</sup> Dari Melaka pula agama Islam menuju ke kota-kota pelabuhan di utara pulau Jawa. Bersamaan dengan berdatangnya pedagang-pedagang Islam dari Pasai untuk berniaga ke Melaka diperkenalkan pula oleh mereka penggunaan mata uang emas yang disebut *derham*<sup>7</sup> yang di salah satu sisinya tertera ungkapan *al-sultan al-'adil*, artinya raja yang adil, sebagai aktualisasi Firman Allah dalam Kitab Suci Al-Qur'an, surat al-Nahl ayat 90. Mata uang emas yang tertua di Pasai berasal dari Sultan Malikuzzahir (1297-1326), putera Sultan Ma-

likussaleh.<sup>8</sup> Tradisi memahat puisi pada makam raja-raja juga dimulai di Pasai, di nisan Sultan Malikussaleh (m. 1297), kemudian diamalkan di Melaka pada nisan Sultan Mansur Syah yang mangkat pada tahun 1477, dan kemudian di Pahang, di pantai timur Semenanjung Tanah Melayu, di nisan keturunan Sultan Melaka, yaitu Sultan Abd al-Jamil yang mangkat pada tahun 1511/1512<sup>9</sup>. Menurut Hikayat Patani Raja Patani yang bernama Paya Tu Naqpa diislamkan oleh seorang alim dari Pasai bernama Syaikh Sa'id. Hemenuhi permintaan Raja itu Syaikh dari Pasai ini memberi nama Sultan Isma'il Syah Zillullah Fil' Alam kepada raja yang baru masuk Islam itu. Setelah Sultan Isma'il mangkat baginda digantikan oleh puteranya bernama Sultan Mudhaffar Syah dan atas nasihat seorang Syaikh dari Pasai bernama Syafiuddin, Sultan ini mendirikan mesjid sebagai kenyataan adanya agama Islam di Patani<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*, translated from the Portuguese, MS in the Bibliothéque de la Chambre des Deputés, Paris, and edited by Armando Cortesao, Vol. I, hlm. 240-2. Lihat juga, William Shaw and Hohd. Kasim Haji Ali, *Malacca Coins*, 1970, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> T. Ibrahim Alfian, "Samudra Pasai: A Trade Harbour And A Centre Of Islamic Art And Culture", dalam *International Seminar Harbour Cities Along The Silk Roads UNESCO*, Surabaya: Indonesia 9-14 January 1991, hlm. 8-15. Lihat juga J. Hulshoff Pol, *De Gouden Munten (Mas) van Noord-Sumatra*, Amsterdam, Johannes Muller, 1929, hlm. 6-7.

<sup>9</sup> T. Ibrahim Alfian, "Puisi dalam Nisan: Pertalian antara Pasai, Melaka, Pahang", dalam *Malaysia in History*, Vol. XVI No. 2, Desember 1973, hlm. 34-36.

<sup>10</sup> A. Teeuw and D.K. Wyatt, *Hikayat Patani*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1970, hlm.71-79.

Hikayat Banjar mengisahkan pula bahwa puteri Pasai yang dikawini oleh raja Majapahit mempunyai seorang adik lelaki yang bernama Raja Bungsu dan pangeran Pasai ini mendapat izin dari Raja Jawa itu untuk bertempat tinggal di Ampelgading, Jawa Timur serta mengislamkan daerah ini. Raja Bungsu, yang dikenal dengan nama Pangeran Makhudum, berhasil membawa petinggi Jipang memeluk agama Islam dan menikahi puteri petinggi itu. Putera Pangeran Makhudum bernama Pangeran Bonang dan cucu Puteri Pasai yang bersuamikan Raja Majapahit yang diasuh oleh Nyai Suta-Pinatih yang bertempat tinggal di Gresik diberi nama Pangeran Giri.<sup>11</sup>

Kedua, di dalam tradisinya masyarakat Aceh mengenal ungkapan "*Adat bak Po Teumeureuhom, Nukom bak Teungku Syiah Kuala*, yang artinya, dalam masalah adat, pemerintahan, ekonomi, politik, dan sebagainya orang merujuk kepada Sultan Iskandar Muda (memerintah, 1601-1636), sedangkan dalam hal hukum syara' atau hukum agama orang merujuk kepada Teungku Syiah Kuala atau Syaikh Abd al-Rauf al-Singkili (1615-93).

Adapun mengenai pandangan dunia, *Weltanschauung*, orang Aceh terdapat pula dalam karya seorang

ulama besar Aceh di abad XIX Shaikh 'Abbas ibnu Muhammad alias Teungku Chik Kutakarang yang dalam kitabnya *Tadskirat al-Rakidin* (1889) mengemukakan antara lain sebagai berikut. *Adat bar adat hukom ban hutom, adat ngon hukom sama kembar; tatkala mufaka: adat ngon hukom, nanggroe seunang hana goga*, artinya, "Adat menurut adat, hukum syariat menurut hukum syariat, adat dengan hukum syariat sama kembar; tatkala mufakat adat dengan hukum syariat negeri senang tiada huru-hara".<sup>12</sup>

Dari apa yang dikemukakan ini dapat terlihat bahwa masyarakat Aceh mempunyai aturan-aturan yang dilandasi atas dan ditopang oleh ajaran-ajaran Islam. Di samping itu dapat pula disimpulkan adanya usaha untuk mengadakan "ideologisasi" struktur kepemimpinan Aceh.

Ketiga, perang melawan Belanda yang memakan waktu 40 tahun lamanya (1873-1912) merupakan perang yang terlama dalam sejarah kolonialisme Belanda dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kedua pihak. Perang melawan Belanda ini menciptakan sejumlah besar *Hikayat Perang Sabil* yang dapat mengobarkan semangat melawan Belanda sehingga orang rela mati syahid. Belanda menganggap

<sup>11</sup> J. J. Ras, *Hikayat Bandrar. A Study In Malay Historiography*, The Hague Nartinus Nijhoff, 1968, hlm. 416-420

<sup>12</sup> Abbas ibn Muhammad, *Tadzkirat al-Rakidin*, MS. Cod. Or. 8038, UB Leiden, hlm. 68.

Hikayat ini amat berbahaya, sehingga dilakukan upaya untuk mencari dan memusnahkannya. Perang ini juga melahirkan sejumlah pahlawan-pahlawan, antara lain Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, Teuku Panglima Polem Hahmud Arifin, dan Teuku Umar.

Keempat, Revolusi Nasional 1945-1949, yang memberi kesempatan kepada Aceh mengaktualisasi dirinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Berikut ini kutipan yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah mengenai hal ini:<sup>13</sup>

...periode revolusi kemerdekaan nasional dirasakan sebagai bukti dari keterlibatan Aceh dalam "masyarakat bangsa" yang telah mengatasi ke-Aceh-an, dan lebih penting lagi, bagaimana dengan ke-Aceh-an cita-cita nasional dapat dibina. Adalah suatu kebanggaan untuk mengingat kenyataan betapa Aceh merupakan satu-satunya wilayah di tanah air kita yang terbebas dari injakan tentara Belanda, dan bagaimana Aceh demi kesadaran nasional dan *lillahi ta'ala* memberikan apa saja yang diperlukan bagi perjuangan nasional merebut kemerdekaan.

Aceh, yang diberi julukan daerah modal oleh Presiden Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 4 September 1959 di Meulaboh, Aceh

Barat,<sup>14</sup> pada bulan Agustus 1948 menyumbangkan dua buah pesawat terbang kepada RI, di antaranya satu dikaryakan di Burma, dan menjadi cikal bakal *Garuda Indonesian Airways*. Di samping itu dalam tahun 1949 Aceh juga menyumbangkan dana kepada Pemerintah Pusat R.I. di Yogyakarta untuk biaya perwakilan R.I. di luar negeri, untuk Angkatan Perang R.I., dan untuk biaya pengembalian Pemerintah R.I. ke Yogyakarta.<sup>15</sup>

Pada tanggal 17 Maret 1949 dr. Tengku Mansur selaku Wali Negara Sumatera Timur (NST) mengirim surat kepada pihak Republik Indonesia di Aceh, yang isinya (dalam ejaan baru) sebagai berikut.<sup>16</sup>

Kehadapan  
Yang Mulia Gubernur Militer  
Aceh di Kutaraja

Perkembangan perjalanan politik di Indonesia menunjukkan semakin jelas bahwa adalah berfaedah dan baik bagi suku-suku bangsa di Sumatera untuk mencapai kerja sama yang lebih rapat dan lebih baik, yaitu suatu kerja sama yang akan dapat berhadir bukan saja dalam lapangan politik dan ekonomi, tetapi juga dalam beberapa banyak cara yang lain. Itulah

<sup>14</sup> Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *Modal Revolusi 1945*, Kutaraja/ Jakarta, Maret 1960, hlm. 103.

<sup>15</sup> S.M. Amin [mantan Gubernur Sumatera Utara], *Kenangan-kenangan dari Masa Lampau*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1978, hlm. 103.

<sup>16</sup> Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990, hlm. 406-7.

<sup>13</sup> Taufik Abdullah, *loc. cit.*

sebabnya maka saya merasa boleh mulai menggerakkan untuk mengundang wakil-wakil segala daerah Sumatera buat turut serta dalam suatu Mukhtamar Sumatera yang akan berlangsung di Medan pada tanggal 28 Maret 1949 ini.

Tujuan Konferensi ini, yang lebih kurang lima hari lamanya, ialah mengadakan hubungan pertama diantara daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera yang berbagai-bagai itu dan menyatakan pengharapan saya moga-moga perhubungan yang pertama ini berangsur-angsur tumbuh menjadi pertalian yang bertambah-tambah eratnya untuk kebahagiaan bangsa Sumatera dan bangsa Indonesia seluruhnya. Negara Sumatera Timur akan merasa sebagai suatu kehormatan untuk menerima perutusan Tuan sebagai tamu selama Mukhtamar itu.

Yang diundang ialah: Aceh, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Bengkulu, Indragiri, Jambi, Riau, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu. Terlepas dari segala perbedaan paham politik, saya menyatakan pengharapan saya, supaya Aceh juga menyuruh suatu perutusan mewakilinya pada muktamar pertama dari suku-suku bangsa Sumatera ini. Pembesar-pembesar di Sabang telah diperintahkan untuk menyambut perutusan Tuan dan mengawannya ke Medan dengan kapal terbang.

Wali Negara Sumatera Timur  
ttd.

dr. T. Mansur

Persepsi Aceh terhadap undangan NST itu termuat dalam surat kabar *Semangat Merdeka* yang terbit di Kutaraja tanggal 23 Maret 1949, yang memuat pernyataan

Teungku M. Daud Beureueh, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, sebagai berikut.<sup>17</sup>

Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah bersemangat Republikier. Sebab itu juga, undangan dari Wali Negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja, dari karena itulah tidak kita balas.

Di Aceh tidak terdapat salai paham sebagaimana diterangkan oleh Belanda itu dengan muktamar Sumatera. Maksud Belanda ialah hendak mendiktekan kepada di Mansur supaya menjalankan politik *divide et impera*-nya lagi, sebab itu kita menolak adanya Mukhtamar Sumatera tersebut dan kita sendiri telah siap sedia menanti segala kemungkinan yang bakal timbul dari sikap penolakan kita itu. Kita yakin bahwa mereka yang telah menerima undangan dr. Mansur tersebut, bukanlah orang Republikien, tetapi adalah kaki tangan dan budak kolonialisme Belanda yang selama ini sudah diberi makan roti.

Kesetiaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah RI bukan dibuat-buat serta diada-adakan, tetapi kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang keluar dari lubuk hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah negara per negara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi.

Demikianlah semangat persatuan rakyat Aceh dibawah bendera.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 407

Republik Indonesia dinyatakan oleh Teungku M. Daud Beureueh. Alangkah tepatnya sikap yang telah diambil oleh Teungku M. Daud Beureueh itu. Andaikata tidak demikian, mungkin sekali peta Republik Indonesia tidaklah sebagaimana yang kita warisi dewasa ini. Akan tetapi apa yang terjadi empat tahun kemudian?

### III

Sebelum kita sampai kepada pembicaraan mengenai proklamasi Teungku H. Daud Beureueh pada tanggal 20 September 1953 yang memisahkan diri dari Republik Indonesia dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di Aceh, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu beberapa peristiwa yang mendahuluinya.

Sesuai dengan undang-undang tahun 1945 yang membagi wilayah Indonesia atas 10 provinsi, Daerah Aceh pada permulaan kemerdekaan merupakan sebuah keresidenan dan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera dengan Gubernur pertamanya Mr. Teuku Muhammad Hasan.

Kemudian, Sumatra dibagi-bagi dalam tiga daerah administratif atau sub-provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan dengan masing-masing Mr. S.M. Amin, Mr. M. Nasrun, dan Dr. Isa, sebagai Gubernur Muda.

Pada tanggal 15 April 1948 Pemerintah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948 membentuk tiga daerah otonomi setingkat provinsi di Sumatra dengan sub-Gubernur, dan Gubernur lama, Mr. T. M. Hasan menjadi Komisaris dengan Komisariat yang bertugas dalam lapangan perundang-undangan dan pengawasan.

Dalam rapat tanggal 13 Desember 1948 s/d 16 Desember 1948 di Tapak Tuan, Aceh Barat, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatra Utara dengan 45 orang anggota dan lima orang anggota Badan Eksekutif.

Adanya Provinsi Sumatra Utara ini tidak berlangsung lama. Reorganisasi pemerintahan di Sumatra perlu dilakukan mengingat makin meningkatnya serangan-serangan pihak Belanda dan untuk menghadapi itu dikehendaki adanya suatu sistem pertahanan yang lebih kuat dan sempurna, dengan memusatkan kekuasaan alat-alat sipil dan militer di bawah satu tangan yaitu Gubernur Militer. Diangkatlah Tgk. M. Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer yang sejak agresi Belanda I telah menyandang jabatan itu. Perubahan sistem ini didasarkan pada keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, tanggal 16 Mei 1949 no. 21/Pem/P.D.R.I., dan dengan demikian jabatan Gubernur Sumatra Utara dihapuskan.

Dengan instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Per-

dana Menteri tanggal 15 September 1949, daerah Sumatra Utara dibagi atas dua daerah Militer Istimewa, yaitu Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, di bawah Gubernur Militer Tgk. M. Daud Beureueh, serta Tapanuli, Sumatra Timur-Selatan di bawah Gubernur Militer Dr. F. L. Tobing.

Berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam bentuk peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti peraturan Pemerintah, tertanggal Kutaraja, 17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.H., dibentuklah Provinsi Aceh dengan Teungku M. Daud Beureueh sebagai Gubernur. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa untuk menyempurnakan dan melancarkan pemerintah, daerah Provinsi Sumatra Utara perlu dibagi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli-Sumatra Timur Selatan.

Mengenai otonomi Aceh ini, Mr. S. M. Amin menulis sebagai berikut.<sup>18</sup>

Autonomie Atjeh pada hakekatnja bukanlah menjerupai suatu keinginan umum sebagai didjelaskan dalam considerans peraturan pembentukannya. Bukan sejumlah ketjil dari rakjat jang mengambil sikap menolak, oleh karena pemberian autonomie ini dengan Tgk. Daud Beureu'ih sebagai instansi Pemerintahan tertinggi sedangkan pengikutnja, kawan separ-

tai, sebagai tenaga2 terpenting dalam pemerintahan, berarti menurut pendapat mereka suatu penyerahan seluruhnja kekuasaan dalam daerah kepada partai Pusa dengan tidak ada pengawasan dan tuntunan dari pada instansi jang lebih tinggi; berlainan halnya pada masa jang lalu, sewaktu Atjeh, baik masih menjerupai suatu daerah militer istimewa, maupun masih menjerupai sebagian dari provincie Sumatra Utara.

"Memang", lanjut S.H. Amin seterusnya, "Sedjak semula dapat diduga akan timbulnja reaksi terhadap provincie ini, tidak hanya dari pihak golongan rakjat jang tidak termasuk golongan Tgk. H. Daud Beureu'ih, akan tetapi djuga dari dari pihak anggota2 pemerintahan, anggota2 parlemen dan kaum politici di Djakarta."<sup>19</sup>

Pihak Pemerintah Pusat atau yang mewakili Kementerian Dalam Negeri dan yang seharusnya melantik Gubernur dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Provincie tidak hadir, meskipun mengenai acara ini telah terlebih dahulu dikawatkan ke Yogyakarta.

Pada bulan Maret 1950 Pemerintah Pusat di Yogyakarta mengirimkan sebuah "panitia penyelidikan" yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri Hr. Susanto Tirtoprodjo untuk mengadakan penyelidikan di Sumatera, antara lain, mengenai Provinsi Aceh. Pada tanggal 13 Maret 1950 diadakan pertemuan

<sup>18</sup> S. M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*. Jakarta, N. V. Soeroengan, ca. 1957, hlm. 28.

<sup>19</sup> *Ibid*

dengan instansi-instansi pemerintah daerah dan dalam pertemuan itu dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pemerintah Pusat belum menetapkan adanya provinsi Aceh dan maksud kedatangan panitia adalah untuk mengumpulkan bahan guna dijadikan pertimbangan perlu tidaknya diadakan provinsi Aceh.

Menyambut keterangan Menteri Dalam Negeri itu Gubernur Tgk. M. Daud Beureueh, Ketua DPR Aceh, Tgk. A. Wahab dan beberapa anggota DPR Aceh, T. H. Amin, Zaini Bakri, Abd. Gani, mengemukakan pendapat masing-masing. Pada pokoknya pendapat mereka itu, menurut S.H. Amin adalah untuk mempertahankan provincie Aceh dengan alasan "keinginan rakyat" dengan utjapan seterusnya oleh Zaini Bakri, "Djikalau Atjeh tidak menjadi provincie, mungkin Pemerintah Pusat tidak dapat mengatasi kesulitan yang mungkin terjadi".<sup>20</sup>

Suasana yang meliputi Aceh waktu itu oleh Hr. S. H. Amin dilukiskan sebagai berikut:

Desas-desus [garis bawah dari pemakalah] tentang masih perlunya provincie Atjeh disjahkan dan belum pastinya pengesahan ini diberikan oleh Pemerintah Pusat, mulai terdengar dalam kalangan masyarakat sendiri. Kegelisahan [garis bawah dari pemakalah] yang memang tetap ada dalam kalangan masyarakat se-

bagai akibat berbagai persoalan, sebagaimana terlebih dahulu telah diuraikan, mulai bertambah pula. Golongan yang tidak menjukai provincie Atjeh, memperoleh harapan lagi; semangat mengusahakan penghapusan provincie yang tidak disukai itu, mulai timbul dan diwujudkan dalam beberapa tindakan yang nyata, baik yang menjerupai utjapan<sup>2</sup>, maupun yang menjerupai tulisan<sup>2</sup> dihari<sup>2</sup>. Djuga mereka yang mempertahankan provincie Atjeh, tidak ketinggalan dengan contra argumenten, sehingga menjadi-djadi pulalah tindakan<sup>2</sup> serang menjerang dengan kata<sup>2</sup> polemiek<sup>2</sup> dalam hari<sup>2</sup> atau madjalah<sup>2</sup> dan rapat<sup>2</sup>, dimana masing<sup>2</sup> mengemukakan pendirian<sup>2</sup> mereka yang berachir dengan resolutie<sup>2</sup>. (Lihat Lampiran A).

Apa yang terjadi selanjutnya? Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam sidangnyanya tanggal 8 Agustus 1950 memutuskan bahwa sesuai dengan persetujuan RIS-RI wilayah Indonesia dibagi dalam 10 daerah provinsi satu diantaranya adalah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan peraturan darurat Wakil Presiden R.I Hr. Sjafruddin Prawiranegara tentang Provinsi Aceh tidak disahkan. Sebagai tindak lanjut putusan Dewan Menteri RIS itu keluarlah Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950, tentang pembentukan provinsi-provinsi.

Empat hari setelah diambilnya keputusan oleh Dewan Menteri RIS, pada tanggal 12 Agustus 1950 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh mengadakan rapat dan telah diambil keputusan dengan suara

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 30

bulat untuk menolak penetapan Pemerintah dan Aceh meminta tetap menjadi provinsi tersendiri. Sebagai alasan dikemukakan sebagai berikut.<sup>21</sup>

Persatuan jang telah berabad2 itu djangan dipetjah2 dengan adanya pusat kekiblat jang baru. Dengan segala potentie jang ada dalam lingkungan persamaan historis, geografis, ethnologie, psychologis, philosophie, sosial, economie, staatkunde, politiek, agama, pendidikan dan kebudayaan, Atjeh minta mengurus dirinja sendiri dibawah pengawasan Pemerintah Pusat, mengedjar ketinggalan jang djauh dalam berbagai2 lapangan dan untuk memenuhi tuntutan rakjat jang agak harmonis dengan keadaan lahir dan bathinnja. Ia perlu memasak dirinja dulu semasak2nja guna lebih mudah ditempatkan didalam ke Indonesiaan dalam arti seluas kata.

Ia bukan hendak menjisihkan dirinja dari saudara2nja jang lain. Ia tetap setia pada Pemerintah Pusat, tjinta pada saudara lain, buktinja tjukup (berapa daja upaja Belanda, gerakan Pemuda Atjeh di Singapura, Medan, Djakarta, Penang, Sabang untuk memecahkan Atjeh dengan Pusat. Budjukan Dr. Mansur dengan conferentie Sumatera, djangan gerakan didalam daerah sendiri [sic]).

Atjeh minta mengurus diri sendiri dalam bentuk autonoom jang luas, guna lekas tertjapai kebahagiaan rakjat jang berarti pertolongan besar bagi Pemerintah Pusat.

Sebaliknya, djika Atjeh dimasukkan dalam provincie Sumatera Utara, lebih banjak kesulitan2 jang dihadapi [dari] pada keuntungan jang diharapkan oleh Pemerintah Pusat.

Melihat kegelisahan dalam ma-

syarakat, Pemerintah Pusat mengirimkan sebuah rombongan yang, antara lain, terdiri dari Menteri Dalam Negeri Mr. Asaat, Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara, anggota-anggota DPRS Amelz dan Tgk. H. Nur el-Ibrahimi dengan tugas menyampaikan keputusan Pemerintah dan berusaha agar putusan itu diterima oleh daerah. Pertemuan diadakan pada tanggal 26 September malam hari dipimpin oleh Gubernur Aceh, Tgk. Daud Beureueh.<sup>22</sup>

Dalam pertemuan itu seluruh bupati/kepala daerah yang hadir, terkecuali Bupati/Kepala Daerah Atjeh Tengah, Abd. Wahab, menyokong tuntutan provinsi otonom bagi Aceh dengan alasan-alasan Agama. Setelah mendengar alasan-alasan yang dikemukakan, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengharap kesediaan rakyat Aceh untuk menekan perasaan dan menerima ketetapan yang telah diambil pemerintah. Dikemukakan oleh Menteri, bahwa Islam tetap mendapat perhatian cukup, dan adanya saudara-saudara M. Natsir sebagai Perdana Menteri dan Mr. Assaat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam pemerintahan merupakan suatu jaminan.<sup>23</sup>

Rapat diakhiri dalam suasana hangat [garis miring dari pema-kalah] disertai ketidakpuasaan

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

pada pihak penuntut otonomi Aceh.<sup>24</sup>

Keesokan harinya, pada tanggal 27 September 1950, golongan penuntut otonomi mengadakan pertemuan dan dalam pertemuan itu dengan suara bulat diputuskan untuk membuat suatu pernyataan yang dinamakan "Pernyataan yang terakhir" untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat di Jakarta, yang isinya, apabila Pemerintah tidak dapat menyetujui tuntutan rakyat Aceh, yaitu Aceh yang berotonomi dalam arti yang seluas-luasnya, mereka yang menandatangani pernyataan itu akan meletakkan jabatan sebagai pegawai negeri. Sebagian besar wedana, camat, dan pegawai-pegawai lain yang telah mewakili diri mereka kepada para penandatanganan Pernyataan itu juga akan meletakkan jabatan. Demikianlah isi pernyataan yang bersifat ultimatum itu.<sup>25</sup>

Pihak yang mempertahankan provinsi Aceh terus menjalankan kegiatan mereka terutama dengan mengadakan rapat-rapat umum untuk memberi keyakinan kepada rakyat tentang keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan adanya provinsi Aceh.<sup>26</sup>

Pada tanggal 27 November 1950 berkunjung ke Kutaraja Wakil Pre-

siden RI Mohd. Hatta untuk mengadakan pertemuan dengan para terkemuka bertempat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan Pemerintah Pusat, menghapuskan provinsi Aceh dan memasukkan Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Wakil Presiden tidak berhasil meyakinkan yang hadir dan ketegangan meliputi suasana rapat seperti halnya pertemuan dengan rombongan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 September 1950.<sup>27</sup>

Baru setelah Perdana Menteri M. Natsir mengunjungi Kutaraja pada tanggal 22 Januari 1951 dengan maksud dan tujuan yang sama dengan kunjungan Menteri Dalam Negeri dan Wakil Presiden, golongan pro provinsi Aceh menerima untuk sementara pembentukan provinsi Sumatera Utara.<sup>28</sup>

Dicapai kesepakatan bahwa tuntutan otonomi Aceh tidak ditolak Pemerintah Pusat, tetapi akan diusahakan dan diperjuangkan integral dan keputusan pembubaran Provinsi Aceh dibacakan sendiri oleh Perdana Menteri Natsir di depan corong RRI Kutaraja pada tanggal 23 Januari 1951 dengan terlebih dahulu membaca beberapa ayat Quran dan hadits Nabi.<sup>29</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 37

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>29</sup> Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*. Jakarta, Grafiti, 1992, hlm. 134

Lebih dari dua setengah tahun berlalu, tiba-tiba pada tanggal 20 September 1953 Teungku M. Daud Beureueh atas nama Ummat Islam Daerah Aceh memproklamasikan Daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia mengikuti jejak Kartosuwiryo, yang pada tanggal 7 Agustus 1949 mengumumkan berdirinya Negara Islam Indonesia.

"Apa sebab Aceh berontak...?"<sup>30</sup> Demikianlah pertanyaan yang diajukan oleh A.H. Gelanggang, salah seorang tokoh Negara Islam Indonesia Daerah Aceh, dalam bukunya *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S. M. Amin* (1956).<sup>31</sup>

Berkaitan dengan pertanyaan ini ia menguraikan sebagai berikut.

Selalu kita mendengar bahwa sebab musabab Atjeh memberontak adalah (a) Karena Teungku M. Daud Beureueh diturunkan dari kursi ke Gubernurannya dan dipindahkan ke Kementerian Dalam Negeri dengan tidak diberikan kursi.... (b) karena dileburkan Propinsi Atjeh oleh Pemerintah Pusat, (c) karena takut akan golongan feodal yang akan memajukan tuntutan kepada pemimpin2 Atjeh yang turut dalam Revolusi 45 dan telah menghabiskan harta kaum feodal untuk kekajaan mereka, (d)

Karena gila pangkat, (e) Karena tidak senang melihat suku lain berkuasa dan memegang peranan dalam pemerintahan di Atjeh, (f) dan seribu satu sebab lain yang dikemukakan, menurut kata hatinja dan bukan setjara realiteit.

Setelah mengutip keputusan Kongres Alim Ulama se-Indonesia yang diadakan di Medan dalam bulan April 1953, yang diketuai oleh Tgk. M. Daud Beureueh, yang berbunyi: "Memperjuangkan dalam Pemilihan Umum yang akan datang supaya Negara Republik Indonesia ini menjadi Negara Islam Indonesia", A. H. Gelanggang mengemukakan sebab-sebab para ulama menggerakkan rakyat untuk memisahkan diri dari Negara Pancasila. Antara lain adalah karena telah muak melihat Agama Islam dice-moooh dan dihina terus menerus, kerusakan-kerusakan moral pemuda-pemudi, adanya perzinahan di setiap liku Negara, sedangkan perhatian Pemerintah dan alat-alatnya kurang sekali terhadap hal itu, adanya kecurangan-kecurangan alat Negara yang memeras rakyat, baik dari sudut lalu lintas, dari sudut perdagangan, di berbagai jawatan, dst., berjangkitnya penyakit korupsi yang parah yang dilakukan oleh pegawai tinggi, menengah, dan bawahan yang menyebabkan Negara bangkrut karenanya<sup>32</sup>

Para Ulama kembalinya dari Mukhtar Medan itu mengadakan

<sup>30</sup> A. H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Aceh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*, Tanpa tempat terbit, Pustaka Murnihati, 1956, hlm. 9.

<sup>31</sup> A. H. Gelanggang adalah nama samaran T. A. Hasan, mantan Bupati Pidie, dan pada tahun 1956 menjadi Menteri Keuangan Kesehatan NII, Negara Bahagian Aceh.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 10-13.

rapat umum, terutama di daerah Aceh, yang dihadiri oleh beribu-ribu pria dan wanita, dan di dalam rapat-rapat umum itu disampaikanlah semua keputusan Kongres dan di samping itu diajak pula antara lain agar dalam Pemilihan Umum nanti umat Islam harus memilih Blok Islam.<sup>33</sup> Berbulan-bulan Teungku Daud Beureueh pergi terus menerus ke seluruh Aceh mengadakan pidato-pidato yang menyerupai kampanye Pemilihan Umum.<sup>34</sup> Teungku Daud Beureueh sendiri, menurut A. H. Gelanggang, dalam pernyataannya mengecam Pemerintah Republik Indonesia yang telah melupakan Aceh sebagai daerah modal dan mencegah Aceh berotonomi serta menanggukhan keinginan Aceh itu sampai dibicarakan terlebih dahulu dalam Konstituante yang akan terbentuk setelah Pemilihan Umum yang akan datang.<sup>35</sup>

Beberapa bulan setelah diadakan rapat-rapat umum tumbuhlah laksana cendawan di musim hujan Pandu Islam di mana-mana di seluruh Aceh, mula-mula terdiri dari anak-anak, kemudian pemuda, malah sampai kepada orang-orang tua.<sup>36</sup> Ternyata mereka kemudian mendapat latihan ketentaraan, seperti cara-cara menyerang, diberik-

kan oleh tentara-tentara pilihan yang telah berpengalaman, baik siang maupun malam.<sup>37</sup> Alat-alat Negara mulai tertarik perhatiannya, tetapi mereka tidak berani bertindak.

Pada awal bulan September 1953 diadakan Konferensi Keamanan Daerah oleh Pemerintah di Kutaraja yang dihadiri oleh Kepala Kehakiman dan Kepala Kejaksaan Daerah Aceh serta instansi lain yang ada hubungan dengan soal keamanan. Setelah selesai Konferensi Keamanan itu, atas pertanyaan pers yang mewakili surat kabar *Semangat Merdeka*, Nya' Umar selaku koordinator Kepolisian Daerah Aceh menyatakan bahwa keamanan di Aceh tetap sebagai biasa.<sup>38</sup> Demikianlah alat-alat negara tidak dapat membaca situasi sampai, seperti telah dikemukakan di atas, Tgk. Daud Beureueh memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia Daerah Aceh pada 20 September 1953.

Setelah beberapa tahun lamanya bertarung terjadilah kontak antara pihak Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) dengan pejabat-pejabat Republik Indonesia yang diwakili oleh Gubernur Ali Hasjmy (dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri Sunaryo tanggal 27 Januari 1957) dan Letnan Kolonel TNI Sjamaun

<sup>33</sup> A. H. Gelanggang, *op. cit.*, hlm. 13-14.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

Gaharu, Panglima Komando Daerah Militer Aceh (KDMA) untuk mengadakan gencatan senjata. Sebagai langkah awal tindak lanjut untuk menghentikan permusuhan ditandatangani Ikrar Lam Teh pada bulan April 1957, yang isinya menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan Agama Islam, Rakyat, dan Daerah Aceh.

Dalam pada itu timbul perpecahan di kalangan pimpinan DI/TII. Pada tanggal 15 Maret 1959, Hasan Saleh berhasil mengadakan kudeta dengan mengambil alih kekuasaan sipil dan militer dari tangan Tgk. M. Daud Beureueh, selaku Wali Negara, dan membentuk apa yang dinamakan "Dewan Revolusi dengan tugas menyelesaikan "Peristiwa Aceh" dengan Pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya, berkat jasa-jasa Wakil Perdana Menteri R.I., Hr. Hardi, yang dengan Surat Keputusannya Nomor 1/Missi/1959 tanggal 16 Mei 1959, lahirlah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mempunyai otonomi dalam bidang pendidikan, agama, dan adat istiadat.

Bagaimanakah analisis kita terhadap gerakan yang berorientasi nilai (*value oriented movement*),<sup>39</sup> meminjam istilah Prof. Neil J. Smelser, seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 1953 untuk memisahkan diri dari Negara Republik Proklamasi

1945?

Seperti pernah penulis kemukakan dalam salah satu tulisan terdahulu, gerakan yang berorientasi nilai, menurut Smelser, adalah gerakan yang termasuk dalam kategori *collective behavior*. Gejolak sosial berupa perilaku yang tidak terinstitusionalisasi atau tidak terlembaga, seperti panik, keranjingan-keranjingan, gila mode, revivalisme agama, pergerakan utopis dan mesianistik, pemberontakan dan revolusi, dsb.<sup>40</sup>

Yang menjadi dasar untuk menggerakkan orang-orang agar berpartisipasi dalam episode gejolak sosial dinamakan oleh Smelser *generalized belief*. *Anatomy generalized belief* adalah sebagai berikut: (1) yang bersifat histeris melahirkan panik, (2) yang bersifat pencapaian keinginan melahirkan keranjingan atau tipe tertentu revivalisme dan semacamnya, (3) yang bersifat permusuhan melahirkan upaya pengambinghitan, (4) yang berorientasi norma melahirkan pergerakan *reform* dan *counter reform*, (5) yang berorientasikan nilai melahirkan revolusi politik, pergerakan nasional, pemberontakan menentang Undang-undang Dasar Negara, dan semacamnya.

Smelser mengemukakan bahwa dalam set iap masyarakat terdapat komponen-komponen aksi sosial yang terdiri atas: (1) nilai-nilai, (2)

<sup>39</sup> Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behavior*, New York, The Free Press, 1962, hlm. 9.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm-2.

norma-norma, (3) mobilisasi motivasi perseorangan untuk aksi yang teratur dalam peran-peran kolektivitas, (4) fasilitas situasional atau informasi, keterampilan, alat-alat, dan rintangan-rintangan dalam mencapai tujuan-tujuan yang kongkrit.<sup>41</sup>

Setiap gejolak sosial, kata Smelser, diarahkan kepada komponen-komponen tertentu aksi sosial itu, yakni ditujukan agar dapat mengubah nilai-nilai, norma-norma, peranan-peranan, atau fasilitas-fasilitas.

Menurut Smelser,<sup>42</sup> gejolak sosial dapat terjadi, apabila terdapat sejumlah determinan atau *necessary conditions* yang berturut-turut terdiri atas hal-hal berikut: (1) kekonduktivitas struktural (*structural conduciveness*), yaitu kondusif atau tidaknya struktur sosial budaya masyarakat terhadap gejolak sosial. (2) Ketegangan struktural (*structural strain*), misalnya deprivasi ekonomi dan apa saja yang dianggap sebagai ancaman. (3) Penyebaran "keyakinan" atau "keyakinpercayaan" yang diinternalisasi (*the spread of generalized belief*). Dalam hal ini situasi harus dibuat bermakna bagi para pelaku yang potensial, sumber ketegangan dan cara-cara menghadapinya harus diintensifikasi. (4) Faktor pencetus (*the precipitating factor*) yang berupa sesuatu

yang dramatik. Suatu peristiwa empirik atau situasi tertentu dapat menjadi lebih dari satu determinan dalam gejolak sosial. Krisis keuangan, umpamanya, dapat diartikan sebagai deprivasi ekonomi yang melahirkan ketegangan struktural dan dapat pula menjadi faktor pencetus terjadinya suatu gejolak sosial. (5) Mobilisasi untuk mengadakan aksi (*mobilization into action*). Dalam kondisi ini peranan pemimpin sangat menentukan. Situasi dapat dimulai dengan adanya kepanikan, timbulnya permusuhan, dan diteruskan dengan agitasi untuk reform atau revolusi. (6) Tidak efektifnya pengoperasian kontrol sosial, (*the operation of social control*) dari alat-alat negara dan pemimpin-pemimpin masyarakat untuk mencegah, mengganggu, membelokkan, merintanggi gejolak-gejolak itu, dengan cara: (a) mencegah terjadinya episode gejolak sosial, dan (b) memobilisasi alat-alat negara segera setelah episode gejolak sosial mulai terjadi.

Smelser mempergunakan model penjelasan yang bersifat *eclectic* terhadap fenomena gejolak sosial dengan menamakannya *logic of value added*. Satu faktor saja tidaklah cukup, melainkan kombinasi keenam faktor tersebut di atas itulah yang menyebabkan cukup *efficient* bagi muncul atau meledaknya suatu gejolak sosial.

Apapun alasan-alasan yang dikemukakan tentang sebab musabab

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm-9.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 15-17.

timbulnya gerakan yang berorientasi nilai, yakni gerakan separatis yang dipimpin oleh Tgk. N. Daud Beureueh itu semuanya bermuara kepada faktor ketegangan struktural. Bersama-sama dengan kelima faktor seperti yang dikemukakan oleh Smelser, yang memang dapat diidentifikasi muncul di Aceh sebelum tanggal 20 September 1953 secara *value added*, lahirlah "Peristiwa Aceh".

Ketika Hasan Tiro memulai petualangannya dengan deklarasi "Gerakan Aceh Merdeka" pada tanggal 4 Desember 1976, gerakan berorientasi nilai yang dewasa ini terkenal dengan nama Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Aceh, ia berhasil merekrut pengikut yang relatif jauh kecil jumlahnya dibandingkan dengan gerakan DI/TII 1953. Hal ini disebabkan, antara lain, tidak digunakannya oleh Hasan Tiro ideologi Islam yang menjadi "roh" rakyat Aceh, yang ada kemungkinan dapat diupayakan untuk mengobarkan semangat jihad fisabilillah.

Agar perilaku orang dapat digiring ke arah perilaku kolektif, maka diperlukan sejumlah cara untuk mengkomunikasikan apa yang diyakini (*belief*) kepada masyarakat dan diupayakan pula adanya sejumlah cara agar pengikut-pengikut dapat menjalankan aksinya. *Belief* dapat disampaikan melalui isyarat, lambang atau tanda, desas-desus atau kabar angin melalui ta-

tap muka, media massa, atau melalui penyebaran ideologi.<sup>43</sup> Gagasan Hasan Tiro untuk mendirikan negara merdeka di Aceh dikomunikasikannya melalui pamflet-pamflet berbahasa Inggris, Indonesia, Gayo dan Aceh, dengan menyalahkan "orang asing dari Jawa". Hasan Tiro juga menyebarkan desas-desus atau kabar angin melalui pengikut-pengikutnya yang fanatik, bahwa ia sedang mendatangkan beberapa divisi tentera Amerika dan beberapa divisi lagi tentera Lybia untuk mengusir TNI dari Aceh.<sup>44</sup> Para pendukung Hasan Tiro juga melakukan teror di beberapa tempat, yang menurut Hasan Saleh, cukup menggelisahkan masyarakat.<sup>45</sup>

Dalam gerakan 1953 salah satu sumber ketegangan adalah lenyapnya Provinsi Aceh dan *generalized beliefnya* digali Islam yang berabad-abad telah mapan di tanah Aceh dan diaktipkan oleh para pemimpin gerakan itu sehingga menjadi salah satu determinan gejolak sosial. Sedangkan menurut Hasan Tiro, sumber ketegangan adalah dikuasainya Aceh oleh orang-orang bukan Aceh dan cara mengatasinya adalah dengan hak *self-determination* untuk mendirikan negara merdeka.

Pertanyaan mengenai apa sesungguhnya penyebab etnonasio-

<sup>43</sup> Smelser, *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>44</sup> Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*. Jakarta, Grafiti, 1992, hlm. 338.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm-385.

nalisme dan lokonasionalisme di Aceh seperti gerakan separatis Tgk. Daud Beureueh dan gerakan Hasan Tiro di Aceh dapat dijawab sebagai berikut bahwa ras atau etnonasionalisme hanyalah "outlet" yang vokal belaka dari berbagai hal yang dianggap menimbulkan ketegangan struktural. Baik lokonasionalisme, etnonasionalisme, nasionalisme, agama, maupun peristiwa-peristiwa atau situasi yang telah lama dimiliki atau membudaya dalam kelompok masyarakat tertentu, selalu saja berpotensi untuk dapat diaktipkan menjadi determinan dalam gejolak sosial yang bersama-sama dengan kelima determinan yang lain yang telah disebut di muka, sehingga dapat melahirkan misalnya, gerakan yang berorientasi nilai seperti gerakan separatis itu.

Sebagai kelanjutannya dengan serta merta timbul pertanyaan berikutnya yakni bagaimanakah caranya untuk menghindari terjadinya gejolak sosial-sosial yang berorientasi nilai? Jawabnya sederhana sekali, yakni hindarilah kehadiran apa saja yang dapat menimbulkan ketegangan struktural yang dapat berkembang menjadi determinan gejolak sosial, seperti depri-vasi ekonomi, pengingkaran hak-hak asasi manusia, pelecehan agama, dan lain sebagainya.

Jika gejala resah gelisah mulai tampak, kepala daerah harus segera menanganinya, penerangan yang jelas dan tepat mengenai ke-

bijakan pemerintah harus segera dapat diberikan oleh aparaturne-gara serta para pemimpin non formal guna melenyapkan keresahan dalam masyarakat, sehingga tidak dapat berkembang menjadi salah satu *necessery condition* bagi timbulnya gejolak sosial. Jika counter determinan seperti yang dilakukan oleh Hasan Saleh dalam melawan gerakan Hasan Tiro<sup>46</sup> dapat ditumbuhkembangkan bersama individu-individu dan atau kekuatan-kekuatan lain dalam masyarakat dan dimobilisasi oleh pemerintah, maka gerakan Hasan Tiro sejak 17 tahun yang lalu telah lenyap dari persada Tanah Air Indonesia ini.

Bagaimana langkah-langkah yang harus diambil sekarang untuk mengantisipasi kejadian-kejadian di masa depan dalam kaitan dengan topik yang sedang kita bahas ini?

Pada hemat penulis perhatian hendaknya ditujukan kepada: (1) Masalah pendidikan. Pendidikan formal dan non formal mempunyai kedudukan yang paling strategis. Muatan yang terdapat dalam kurikulum matapelajaran sejarah hendaknya lebih ditekankan pada unsur-unsur integratif dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran mengenai nasionalisme Indonesia yang datang dari Aceh, seperti pandangan Teuku Nyak Arif, dan kesadaran Aceh

<sup>46</sup> Lihat Ibid., hlm. 373-397.

dan semua daerah-daerah lain di Indonesia, serta sumbangan yang diberikan oleh berbagai suku bangsa (jadi bukan suku Jawa saja), betapapun kecilnya, untuk memberikan apa saja yang diperlukan bagi perjuangan nasional merebut kemerdekaan, untuk meminjam ungkapan Dr. Taufik Abdullah, hendaknya dapat disosialisasikan. Bahan-bahan ini hendaknya diberikan juga dalam pendidikan non formal.<sup>47</sup> Meneruskan pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada segenap lapisan masyarakat dengan cara-cara yang terencana baik dan bermutu de-

ngan melibatkan semua pihak, terutama elite agama non birokrat yang terdapat di pedesaan, (2) Mengaktualisasikan dengan tulus motto Bhinneka Tunggal Ika. Harus diseleksi unsur-unsur mana yang dapat diseragamkan mana pula yang tidak dapat dipaksakan di seluruh Indonesia. (3) Alat-alat Negara, baik sipil maupun militer, harus pandai menghormati hak-hak azasi rakyat di daerah-daerah dengan mempelajari dan bertindak dengan sesuai dengan adat-istiadat setempat khususnya dan budaya setempat umumnya.

---

<sup>47</sup> Untuk sekedar contoh patut dikemukakan disini adanya pertalian struktur bahasa antara bahasa Jawa Kuno dengan bahasa Aceh sekarang yang menandakan bahwa dahulu terdapat bahasa kuno yang dipakai luas di Nusantara ini. Demikian pula perlu diketahui oleh masyarakat Aceh bahwa ideologi perang sabil yang telah menjawai semangat Jihad melawan kolonialisme berasal dari luar Aceh, antara lain yang terpenting dari kitab yang dikarang oleh Syaikh Abdussamad dari Palembang berjudul *Nasihah al-Muslimin*.